



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JUNI HANDAJANI
2. Jabatan : KETUA PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN GIGI (PAW)
3. NHK : 722381

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 613.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m²/63 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. Tanah Seluas 123 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 54.000.000
3. Tanah Seluas 46 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. Tanah Seluas 117 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
5. Tanah Seluas 319 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 239.000.000
6. Tanah Seluas 1.334 m² di KAB / KOTA BANYUMAS, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 70.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 160.000.000

1. MOBIL, HONDA HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO SCOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	400.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.173.000.000
III. HUTANG	Rp.	430.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	743.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpni.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpni.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.